

# New Public Management: Konsep dan Penerapannya dalam Pemerintahan Modern

Aris Firmansyah<sup>1</sup>, Awan Asmara Hadi<sup>2</sup>, Dhyta Wasito<sup>3</sup>, Heny Enggaryanti<sup>4</sup>, Lilis Ardini<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia – <sup>1</sup>aris.firmansyah83@gmail.com

<sup>2</sup>awanasmarahadi@gmail.com

<sup>3</sup>dhytawasito@gmail.com

<sup>4</sup>hennyenggaryanti@gmail.com

<sup>5</sup>lilisardini@gmail.com

**Abstract** - New Public Management (NPM) emerged as a response to the growing demand for greater efficiency, transparency, and accountability in public administration. It introduces concepts borrowed from the private sector to improve the performance and responsiveness of public sector organizations. NPM emphasizes decentralization, market-driven mechanisms, competition, and performance-based management. This article explores the theoretical foundations of NPM and its key components, such as customer orientation, results-oriented governance, and performance measurement. It further investigates the implementation of NPM in modern government systems, analyzing its impact on the structure, operation, and effectiveness of public administration. The article highlights various case studies from different countries, showcasing both the successes and challenges faced in adopting NPM practices. While NPM has been praised for fostering a more efficient and service-oriented public sector, it has also faced criticism for creating a more market-driven approach that may undermine public values and social equity. By examining these aspects, the article provides a comprehensive understanding of the role of NPM in shaping contemporary public administration and its potential future development in the context of global governance challenges. Ultimately, the paper reflects on the evolving nature of public management and the continuous adaptation required to meet the needs of modern societies.

**Keywords:** New Public Management, public administration, public sector reform, decentralization, performance management, accountability, efficiency, governance, service delivery, customer-oriented governance.

## 1. PENDAHULUAN

New Public Management (NPM) merupakan sebuah model pendekatan dan terobosan yang lahir pada abad ke-20 akhir untuk merespons adanya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. NPM mereplika prinsip pengelolaan manajemen dari sektor privat atau swasta untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang dicapai oleh lembaga pemerintahan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan pemerintahan yang lebih cepat, tanggap, dan sesuai kebutuhan masyarakat dengan menekankan penggunaan mekanisme pasar, desentralisasi, pengukuran kinerja berbasis hasil, serta peningkatan akuntabilitas.

Menurut Hood (1991), NPM muncul sebagai "jawaban terhadap ketidakpuasan terhadap birokrasi tradisional yang dianggap lambat dan tidak responsif." Prinsip utama NPM berfokus pada pengelolaan yang berbasis hasil dan efisiensi, yang mencakup pengurangan hambatan administratif dan pemberdayaan manajer publik untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif. NPM juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kompetisi antar lembaga, penekanan pada pengukuran kinerja, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas serta kualitas layanan.

Osborne (2006) menambahkan bahwa "New Public Management menuntut perubahan fundamental dalam cara kita memandang pemerintah, beralih dari birokrasi yang kaku menuju sistem yang lebih fleksibel, berbasis hasil, dan orientasi pada kepuasan pengguna layanan." Hal ini tercermin dalam pendekatan yang mengutamakan keterlibatan masyarakat sebagai pelanggan atau konsumen layanan publik, yang dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan layanan yang lebih relevan dan efektif.

Namun, penerapan NPM dalam praktik pemerintahan tidak tanpa tantangan. Beberapa kritik terhadap NPM mencakup potensi hilangnya nilai-nilai publik yang lebih sosial, seperti

keadilan dan pemerataan, dalam upaya meningkatkan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Pollitt dan Bouckaert (2017), "Meski NPM berhasil meningkatkan efisiensi, namun penerapannya sering kali mengabaikan aspek sosial dan keadilan yang seharusnya menjadi prioritas dalam pelayanan publik."

Salah satu isu penting dalam pengelolaan administrasi public adalah *Governance* yang baik karena NPM merupakan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan (Christensen dan Laegreid, 2001; Hoque, 2005)). NPM adalah jawaban akan kebutuhan pelayanan pada Masyarakat dalam bidang administrasi layanan publik terutama di paradigma kelima. Perubahan cara pandang dan konsep berfikir merupakan keinginan dan harapan rakyat akan adanya perubahan terhadap pelayanan publik, karena Sebagian masyarakat masyarakat telah pesimis dan antipati terhadap pelayanan di sektor publik yang terkesan lama, membutuhkan biaya, tidak transparan, dan kurangnya kompetensi personil yang memiliki integritas, cakap, dan selalu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Di era digital, pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisien menjadi semakin penting karena kebutuhan terhadap kualitas pelayanan serta tata kelola pemerintahan yang prima dianggap mendesak untuk disinergikan atau diterjemahkan kembali dalam peraturan perundangan-undangan. NPM yang merupakan pendekatan yang berbasis pelanggan, mempunyai tujuan untuk memperbaiki implementasi kualitas layanan publik terutama di era digital. Praktik tersebut sesuai dengan kebutuhan dan salah satu poin utama agenda reformasi dalam rangka melakukan reformasi birokrasi kearah yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Salah satu komponen dalam NPM yang harus dimiliki suatu organisasi menurut Hood (1991) bahwa NPM mensyaratkan adanya standar dan ukuran kinerja dalam pelayanan publik. Standar ini digunakan sebagai acuan dalam memberikan penilaian terhadap praktik dilapangan. Sedangkan tolok ukur kinerja digunakan untuk menilai dan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau tidaknya dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Bovaird dan Loeffler (2015), NPM menjadikan sektor publik menjadi lebih ramping dan komparatif, serta membuat administrasi publik menjadi responsive dan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menawarkan pengukuran yang bersifat ekonomis, efisiensi, dan efektifitas (*value for money*).

Cikal bakal NPM sendiri di Indonesia diawali oleh lahirnya 3 (tiga) undang-undang tentang keuangan negara yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pemerintah Indonesia, 2003), Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pemerintah Indonesia, 2004a), dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Pemerintah Indonesia, 2004b).

Dari tiga undang-undang inilah akhirnya terbit Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Cash Toward Accrual (Pemerintah Indonesia, 2005b) yang selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual (Pemerintah Indonesia, tahun 2010).

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan di bidang sektor public merupakan dua sisi mata uang. Peran pemerintah yang merupakan organisasi sektor publik, merupakan suatu entitas yang lebih mengutamakan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan prima terutama terhadap kebutuhan dasar masyarakat agar semakin berkualitas. Dengan berkembangnya NPM sebagai prioritas dalam pelayanan, dan berkembangnya layanan pemerintah kepada rakyatnya, semakin besar pula tuntutan terhadap peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitasnya sehingga diharapkan adanya praktik reformasi birokrasi yang cepat, transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai kebutuhan rakyat.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut konsep-konsep dasar dari NPM, serta penerapannya dalam sistem pemerintahan modern. Dengan mengkaji berbagai studi kasus dan kritik terhadap NPM, artikel ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan

pemahaman yang lebih mudah difahami dan mendalam tentang implikasi dan tantangan dari penerapan NPM di dunia pemerintahan kontemporer.

## 2. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar dari New Public Management (NPM) serta penerapannya dalam sistem pemerintahan modern. Dalam rangka mencapai hal itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (literature study) yang bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai literatur yang sesuai dan terkait dengan judul yang diteliti. Pendekatan berbasis deskriptif analitis dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan konsep-konsep utama yang terkandung dalam New Public Management serta menjelaskan penerapan NPM dalam berbagai konteks pemerintahan di berbagai negara. Selain itu, pendekatan ini juga berusaha untuk menganalisis tantangan dan kritik yang terkait dengan implementasi NPM dalam sistem pemerintahan modern. Pengumpulan data menggunakan studi literatur dimana data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, seperti artikel, jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen akademik lainnya yang sesuai dengan topik. Data dikumpulkan melalui beberapa database akademik antara lain, seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, dan SpringerLink. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti "New Public Management," "public administration reform," "performance management," "government efficiency," dan "public sector governance."

Literatur yang dipilih untuk dianalisis harus memenuhi beberapa kriteria seperti dibawah ini :

- a. Kriteria Inklusi yaitu Literatur yang dipublikasikan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, relevan dengan topik NPM dan penerapannya dalam pemerintahan modern, serta berfokus pada konsep dasar, implementasi, dan dampak NPM.
- b. Kriteria Eksklusi yaitu Literatur yang tidak relevan dengan konsep NPM, literatur yang sama sekali tidak membahas aplikasi praktis NPM dalam konteks pemerintahan, atau yang metodologinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah literatur yang relevan dikumpulkan, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur yang dipilih. Beberapa aspek yang dianalisis mencakup:

- a. Konsep-konsep dasar dalam NPM, seperti desentralisasi, pengukuran kinerja berbasis hasil, dan orientasi pada pelanggan.
- b. Penerapan NPM dalam pemerintahan di berbagai negara, termasuk keberhasilan, tantangan, dan kritik terhadap NPM.
- c. Perbandingan penerapan NPM di negara-negara berkembang dan negara maju.
- d. Dampak NPM terhadap efisiensi dan kualitas layanan publik.

Setiap literatur yang dianalisis akan diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai penerapan NPM dalam konteks pemerintahan modern.

**Tabel 1. Penelitian dan Artikel tentang “New Public Management”**

No	Penulis	Judul
1	(Subhan & Agus, 2023)	New Public Management : Perkembangan Dan Aplikasi Dalam Mereformasi Organisasi Publik.
2	(Charity & Sam'un, 2020)	New Public Management (NPM) as an Effort in Governance
3	Aurelia et al (2024)	New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen dalam Organisasi Publik di Indonesia
4	Ridwan & Fachri (2023)	Teori New Public Management: Evaluasi Dan Tantangan Dalam Konteks Pelayanan Publik
5	Sri Hartati (2020)	Penerapan Model New Public Management (NPM) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia
6	Hendrawati (2022)	Implementasi New Public Management (NPM) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
7	Anne, Rahmayanti, Rina (2023)	Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Implementasi Paradigma New Public Governance (NPG)?
8	Chafid et al (2021)	Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi dan Komersialisasi.
9	Rahma et al (2023)	The influence of <i>new public management, organizational culture and competency to employee performance (literature review)</i>
10	Agusta, Indra (2024)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11	(Bryan, Bintoro & Erna, 2025)	Membangun Layanan Publik Yang Partisipatif: Studi Kasus SIPRAJA Melalui Perspektif New Public Governance
12	Sherly, Indrawati (2021)	Telaah Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Perspektif Luder Contingency Model

Sumber : Diolah Dari Berbagai Sumber,2025

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah sintesis temuan-temuan yang ditemukan dalam literatur yang dianalisis. Temuan-temuan ini akan disusun dalam beberapa tema besar, yang akan membentuk kesimpulan dari penelitian ini. Sintesis ini akan mengungkapkan tren, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam penerapan NPM, serta memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi NPM di masa depan.

Keterbatasan yang dihadapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan sumber: Penelitian ini bergantung sepenuhnya pada literatur yang telah diterbitkan dan tersedia di database akademik. Oleh karena itu, temuan-temuan yang diperoleh mungkin tidak mencakup seluruh informasi terbaru terkait topik NPM.
- Keterbatasan dalam penerapan teori: Karena penelitian ini berbasis pada literatur, penerapan konsep-konsep NPM dalam konteks praktis di lapangan dapat bervariasi dan membutuhkan penelitian empiris lebih lanjut untuk memberikan bukti yang lebih mendalam.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Konsep Dasar Penerapan NPM

NPM adalah suatu model sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip pengelolaan koorporasi swasta ke dalam koorporasi sektor publik sebagai upaya melakukan efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan kepada masyarakat. Model ini menekankan pengelolaan berbasis hasil, yang difokuskan pada pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja organisasi publik. Konsep dasar dari NPM mencakup beberapa elemen penting, yaitu desentralisasi, pengukuran kinerja, pengelolaan berbasis pasar, dan orientasi pada pelanggan (Hood, 1991). Desentralisasi dalam NPM memberikan kewenangan lebih besar kepada unit-unit pemerintahan lokal atau individu dalam pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Pengukuran kinerja berbasis hasil adalah elemen yang sangat penting dalam NPM, yang mendorong penggunaan indikator dan evaluasi yang jelas untuk

mengukur kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, orientasi pelanggan menggarisbawahi pentingnya pelayanan dasar kepada rakyat.

### **Penerapan NPM dalam Pemerintahan Modern**

Penerapan NPM telah berlangsung di banyak negara dengan berbagai tingkat keberhasilan. Di USA dan Inggris, NPM diterapkan secara luas untuk mereformasi birokrasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Misalnya, di Inggris, reformasi yang dikenal dengan sebutan "*Thatcherism*" menerapkan prinsip-prinsip NPM seperti desentralisasi, pengelolaan berbasis hasil, dan privatisasi layanan publik (Pollitt & Bouckaert, 2017). Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan dalam birokrasi dan mempromosikan persaingan antar lembaga pemerintah. Di negara berkembang, penerapan NPM lebih bervariasi. Beberapa negara seperti Indonesia dan India telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip NPM dalam reformasi pemerintahan mereka. Di Indonesia, penerapan NPM tercermin dalam kebijakan desentralisasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, tantangan utama di negara berkembang adalah adanya ketimpangan dalam infrastruktur dan kapasitas manajerial yang membatasi keberhasilan penerapan NPM. Dalam banyak kasus, sektor publik di negara berkembang masih berjuang dengan masalah birokrasi yang sangat besar dan ketidakmampuan untuk mengimplementasikan reformasi secara penuh (Kettunen & Kallio, 2019).

### **Keberhasilan dan Tantangan dalam Penerapan NPM**

Penerapan NPM di banyak negara telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan meningkatkan layanan publik. Beberapa keberhasilan yang tercatat antara lain peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, di Singapura, penerapan NPM dalam sektor kesehatan menghasilkan sistem pelayanan yang lebih efisien dengan pengurangan waktu tunggu dan peningkatan kualitas layanan medis. Namun, penerapan NPM bukan tanpa tantangan. Salah satu kritik utama terhadap NPM adalah bahwa pendekatan ini cenderung mengutamakan efisiensi dan pengurangan biaya atau efisiensi, yang dapat mengorbankan nilai-nilai sosial dan keadilan. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, penerapan NPM telah mengarah pada privatisasi layanan publik yang mengurangi akses bagi masyarakat yang kurang mampu terutama dari segi finansial. Hal ini berpotensi menambah kesenjangan sosial, terutama di negara-negara berkembang (Osborne, 2006). Selain itu, kritik terhadap NPM juga mencakup pengaruh pasar yang terlalu dominan dalam sektor publik, yang dapat mengarah pada komodifikasi layanan publik. Seiring dengan dorongan untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi, NPM dapat mengurangi peran negara sebagai penyedia layanan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, beberapa pihak berpendapat meskipun NPM meningkatkan efisiensi, penerapan prinsip-prinsip pasar dalam sektor publik harus tetap hati-hati agar tidak mengabaikan nilai-nilai publik yang lebih besar.

### **Kritik dan Implikasi terhadap Administrasi Publik**

Selain keberhasilan, NPM juga menghadapi sejumlah kritik yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Kritik utama terletak pada penekanan yang berlebihan pada efisiensi ekonomi yang dapat menurunkan fokus pada nilai-nilai sosial seperti keadilan dan pemerataan. Seperti yang dijelaskan oleh Savoie (2003), "NPM mungkin membuat birokrasi lebih efisien, tetapi tidak selalu lebih adil atau lebih inklusif dalam menyediakan layanan publik." Implikasi dari kritik ini adalah bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan antara efisiensi dan keadilan sosial dalam proses reformasi administrasi publik. Untuk itu, beberapa peneliti mendorong agar prinsip-prinsip NPM disesuaikan dengan konteks lokal dan nilai sosial yang ada di negara atau daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat dalam setiap reformasi yang diterapkan.

### **Rekomendasi untuk Penerapan NPM di Masa Depan**

Dari analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan NPM di masa depan. Pertama, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penerapan NPM tidak mengabaikan nilai-nilai sosial yang penting, seperti kesetaraan akses terhadap layanan publik. Kedua, untuk negara berkembang, penguatan kapasitas manajerial dan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan

penerapan NPM. Ketiga, pemanfaatan teknologi berbasis informasi dan komunikasi supaya lebih dimaksimalkan untuk melakukan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip NPM secara fleksibel, dengan mempertimbangkan konteks kearifan lokal dan kebutuhan Masyarakat setempat. Hal ini akan memastikan bahwa reformasi administrasi publik melalui NPM tidak hanya fokus pada sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga berfokus kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut secara menyeluruh. New Public Management (NPM) telah berkembang menjadi pendekatan utama dalam reformasi pemerintahan modern, dengan harapan terjadinya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Konsep dasar ini yang meliputi desentralisasi, pengukuran kinerja, pelanggan atau rakyat, serta pengelolaan berbasis pasar, telah diterapkan di negara dengan hasil yang berbeda-beda. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah berhasil mengimplementasikan NPM untuk merombak struktur birokrasi dan memperkenalkan reformasi berbasis hasil. Namun, penerapan NPM di negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan terkait infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi informasi, kapasitas manajerial, serta ketimpangan sosial. Meskipun NPM telah terbukti meningkatkan efisiensi birokrasi dan layanan publik, pendekatan ini juga menghadapi kritik, terutama dalam hal potensi mengabaikan nilai-nilai sosial seperti kesetaraan dan keadilan. Kritikan terhadap dominasi prinsip pasar dalam sektor publik menunjukkan bahwa penerapan NPM harus lebih hati-hati untuk memastikan bahwa tujuan efisiensi tidak mengorbankan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, penerapan NPM dalam pemerintahan modern membutuhkan pendekatan yang lebih seimbang, yang tidak hanya mengutamakan efisiensi tetapi juga mencakup aspek keadilan dan pemerataan dalam penyediaan layanan publik.

Berdasarkan temuan-temuan dalam artikel ini, terdapat beberapa saran agar dapat meningkatkan penerapan New Public Management dalam pemerintahan modern adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Infrastruktur

Di negara-negara berkembang, peningkatan kapasitas manajerial dan penguatan infrastruktur menjadi hal yang krusial untuk mendukung keberhasilan penerapan NPM. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada para birokrat dan pejabat publik serta memperbaiki sistem teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.

2. Keseimbangan Antara Efisiensi dan Keadilan Sosial

Penerapan prinsip-prinsip NPM harus memperhatikan keseimbangan antara efisiensi dan nilai-nilai sosial seperti keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus dapat memastikan tidak hanya berfokus pada pengurangan biaya, tetapi juga mempertimbangkan akses yang setara terhadap layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Penerapan NPM yang Fleksibel dan Kontekstual

Setiap negara memiliki konteks sosial, budaya, dan kondisi ekonomi yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, penerapan NPM harus dilakukan secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Pendekatan yang berbasis pada hasil sebaiknya disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh pemerintahan setempat.

4. Penggunaan Teknologi untuk Memperluas Aksesibilitas dan Efisiensi

Manfaatkan teknologi berbasis informasi dan komunikasi merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik dan memberikan layanan yang lebih cepat serta terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memaksimalkan potensi TIK dalam proses reformasi NPM, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

5. Evaluasi dan Penyesuaian Berkala

Penerapan NPM harus diikuti dengan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil harus memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan reformasi administrasi publik. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dalam implementasi dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons?* Public Administration, 69(1), 3-19.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis – Into the Age of Austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Osborne, S. P. (2006). *The New Public Governance?* Public Management Review, 8(3), 377-387.
- Hood, C. (2000). *The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management*. Oxford University Press.
- Savoie, D. J. (2003). *The Politics of Public Spending in Canada*. University of Toronto Press.
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2019). *New Public Management and its Implications for Public Sector Reform: A European Perspective*. Public Policy and Administration, 34(2), 149-165.
- Aurelia et al (2024), *New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen dalam Organisasi Publik di Indonesia*, Vol.15, No.2, 2024 pp 54-62  
DOI: <https://doi.org/10.61579/future.v2i.97>
- Hendrawati, H (2022), Implementasi New Public Management (Npm) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Vol 4, No. 2, 2022, Palangga Praja
- Ridwan & Fachri (2023), Teori New Public Management: Evaluasi Dan Tantangan Dalam Konteks Pelayanan Publik, Vol 8, No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.24903/fpb.v9i2>
- Anne, Rahmayanti, Rina (2023), Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Implementasi Paradigma New Public Governance (NPG)?, Vol 7, No. 2, 2023, JIPAGS
- Charity & Sam'un (2020), New Public Management (NPM) as an Effort in Governance, Vol. 3, No. 2, 2020, Bandung
- Sri Hartati (2020), Penerapan Model New Public management (NPM) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Vol 8, No. 2, 2020, DOI 10.33701/jmsda.v8i2.1293
- Subhan & Agus (2023), New Public Management : Perkembangan Dan Aplikasi Dalam Mereformasi Organisasi Publik, Vol. XVII, No. 1, 2023, Cirebon.
- Chafid et al (2021), Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi Dan Komersialisasi, 2021, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>
- Rahma et al (2023), The influence of *new public management, organizational culture and competency* to employee performance (*literature review*), Vol.1 2023 p. 1314-1327, <https://journal.trunojoyo.ac.id/icembus>
- Agusta, Indra (2024), Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Vol. 03, No. 01, 2022, Semarang.
- Bryan, Bintoro & Erna (2025), Membangun Layanan Publik Yang Partisipatif: Studi Kasus SIPRAJA Melalui Perspektif New Public Governance, Vol. 7, No. 3, 2025, DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3>
- Sherly, Indrawati (2021), Telaah Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Perspektif Luder Contingency Model, Vol. 12, No. 02, 2021, Surabaya